

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di Negara Indonesia terus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik secara materil maupun spiritual. Dari tahun ke tahun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta telah membuahkan hasil yang menggembirakan seperti yang kita rasakan dewasa ini yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Namun demikian, peningkatan kesejahteraan hidup tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana tercermin pada tahun 2017, sebanyak 25,95 juta atau 9,82% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (Data Badan Pusat Statistik, 2018). Penduduk yang miskin tersebut umumnya ditandai oleh ketidak bekerja seseorang pada usia kerja karena sulitnya mendapatkan pekerjaan.

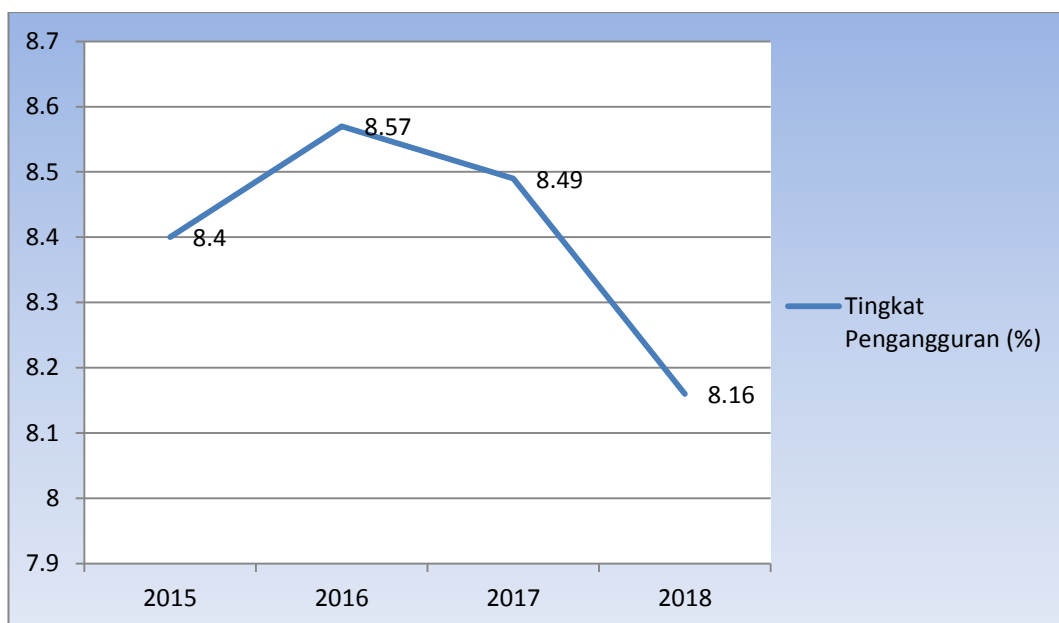
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun ekonominya adalah masalah ketenagakerjaan. Terlebih setelah mengalami krisis multidimensi yang membawa bangsa Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi, politik, moral, dan sosial. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran karena banyaknya bidang usaha yang ditutup karena mengalami pailit. Di samping itu juga masih rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak Negara yang sulit untuk diatasi, termasuk Indonesia. Bila kita amati dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran di Indonesia masih berada di persentase yang tinggi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang ada tidak sanggup untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang makin pesat. Pengangguran merupakan masalah nasional yang harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta maupun antar instansi pemerintah. Banyaknya jumlah pengangguran jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada berbagai masalah baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Menurut Badan Pusat Statistik pada Februari 2018, jumlah angka pengangguran terbuka di Negara Indonesia sebanyak 6,87 juta orang atau 5,33% . Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua nasional yang mencapai 8,16%. Tingginya persentase pengangguran disebabkan tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten / kota di dalamnya, yang mana setiap kabupaten / kota tersebut memiliki persentase tingkat pengangguran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat populasi dan jumlah lapangan pekerjaan yang berbeda di masing-masing kabupaten / kota yang akan berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan di daerah tersebut.

Pengangguran erat kaitannya dengan perkembangan penduduk dan kesempatan kerja, jika kedua hal tersebut tidak disiasati dengan tepat maka munculah berbagai dampak yang bersifat negatif, baik terhadap kestabilan ekonomi maupun terhadap kestabilan sosial dan politik.

**Gambar 1.1**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat (%)**



(Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat)

Angka pengangguran tersebut merupakan akumulasi dari tiap kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat yang tiap daerah memiliki angka berbeda-beda. Untuk menghitung presentase pengangguran terbuka dilihat dari perbandingan penduduk yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, dimana dalam hal ini yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia 15 (limabelas) tahun keatas. Spesifikasi mengenai presentase angka pengangguran yang tersebar di kabupaten / kota provinsi Jawa Barat tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Angkatan Kerja dan Presentase Pengangguran menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**  
**(Penduduk Usia 15 tahun keatas)**

Kabupaten / Kota	Agustus 2018 (Jiwa)	Agustus 2018 (%)
Kab. Bogor	2.600.121	9,55
Kab. Sukabumi	1.123.546	7,66
Kab. Cianjur	941.358	10,10
Kab. Bandung	1.649.064	3,92
Kab. Garut	1.133.248	7,86
Kab. Tasikmalaya	816.033	5,51
Kab. Ciamis	634.932	5,17
Kab. Kuningan	462.403	7,94
Kab. Cirebon	974.469	9,61
Kab. Majalengka	599.365	5,02
Kab. Sumedang	544.805	7,15
Kab. Indramayu	816.531	8,64
Kab. Subang	793.666	8,74
<b>Kab. Purwakarta</b>	<b>432.117</b>	<b>9,11</b>
Kab. Karawang	1.117.545	9,55
Kab. Bekasi	1.572.155	10,97
Kab. Bandung Barat	740.957	9,33
Kab. Pangandaran	243.702	3,34
Kota Bogor	495.824	9,57
Kota Sukabumi	142.285	8,00
Kota Bandung	1.219.398	8,44
Kota Cirebon	156.814	9,29
Kota Bekasi	1.396.946	9,32
Kota Depok	1.085.246	7,00
Kota Cimahi	297.050	8,43
Kota Tasikmalaya	311.874	6,89
Kota Banjar	89.36	5,97
<b>Total Prov Jawa Barat</b>	<b>22.391.003</b>	<b>8,16</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat)

Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran cukup tinggi yang menempati urutan ke tujuh di Provinsi Jawa Barat. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Jawa Barat, hal ini berarti Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang angka pengangguran cukup tinggi di Provinsi Jawa

Barat. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Purwakarta disebabkan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pengangguran di Kabupaten Purwakarta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebanyak 39.366 jiwa dari jumlah angkatan kerja sebanyak 432.117 jiwa, atau sebesar 9,11%.

Pengangguran di Kabupaten Purwakarta memang suatu masalah kompleks yang harus segera diatasi. Pengangguran akan dikatakan wajar bilamana menimpa pada penduduk usia belasan tahun dimana mereka baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Namun kenyataannya, penduduk pengangguran terbuka pun terdapat pada kelompok usia 20 tahun bahkan 30 tahun ke atas dimana seharusnya merupakan usia yang sudah sangat produktif untuk bekerja. Berikut disajikan data pada tabel 1.2 mengenai data pengangguran di Purwakarta berdasarkan kelompok umur.

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penduduk Kabupaten Purwakarta Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan (%)**

Kelompok Umur	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)					Jumlah (%)
	Tidak/Belum Pernah Sekolah (%)	Sekolah Dasar (%)	Sekolah Menengah Pertama (%)	Sekolah Menengah Atas (%)	Perguruan Tinggi (%)	
15-19	-	11,67	46,12	42,20	-	100,00
20-24	-	8,57	23,45	61,60	6,39	100,00
25-29	-	4,02	33,70	41,96	20,33	100,00
30-34	-	22,98	52,59	10,63	13,80	100,00
35-39	11,74	25,09	16,24	29,96	16,97	100,00
40-44	10,76	34,33	23,84	27,61	3,46	100,00
45-49	25,27	25,97	14,32	11,81	22,63	100,00
50-54	46,05	25,81	-	14,10	14,03	100,00
55-59	52,43	34,21	-	-	13,36	100,00
60-64	31,33	68,67	-	-	-	100,00
65+	36,20	63,80	-	-	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>14,10</b>	<b>23,06</b>	<b>23,02</b>	<b>28,12</b>	<b>11,69</b>	100,00

(Sumber : BPS, SAKERNAS Kabupaten Purwakarta Tahun 2017)

Masalah pengangguran selalu menjadi isu di Kabupaten Purwakarta. Hal ini dibuktikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta sejak periode 2008-2013 hingga periode 2018-2023 isu pengangguran selalu dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah, selain itu pula pada dokumen Renstra Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2018, pengangguran merupakan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyebab terjadinya pengangguran juga disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Mereka tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang lebih baik. Akibatnya orang-orang yang mempunyai kualitas rendah

akan mengganggu. Selain itu juga masalah pengangguran juga dapat disebabkan lowongan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda dengan yang diharapkan perusahaan akibatnya tidak dapat bekerja. Banyaknya jumlah pengangguran jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada berbagai masalah baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu langkah yang efektif. Langkah yang tepat sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berperan untuk melakukan penanganan terhadap masalah ketenagakerjaan salah satunya pengangguran. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan disebutkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, kesejahteraan pekerja, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tingginya pengangguran di Purwakarta, salah satunya melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) merupakan program unggulan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang kemudian diturunkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Purwakarta. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diawali dengan pelatihan secara konvensional kepada penduduk tenaga kerja rentan. Hal tersebut dilakukan karena tujuan dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk menciptakan wirausahawan mandiri yang nantinya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lainnya.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia sejak tahun 2015. Sedangkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan sejak tahun 2017. Berikut disajikan data nama-nama Desa di Kabupaten Purwakarta yang mendapatkan bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sejak tahun 2017 hingga 2019.



**Tabel 1.3**  
**Datar Desa Penerima Program TKM Tahun 2017-2019**  
**di Kabupaten Purwakarta**

No	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Citeko	Panyindangan	Taringgullandeh
2	Cilegong	Ciwareng	Cilandak
3	Sukajaya	Pasanggrahan	Sukamulya
4	Pasawahan Kidul	Cisarua	Bunder
5	Cipancar	Cipaisan	Nagri Kidul
6	Malangnengah	Cinangka	Cadas Sari
7	Babakansari	Bungursari	Karangmukti
8	Cirende	Cidahu	Gandasoli
9	Ciracas	Cicadas	-
10	Cadas Mekar	Cisantri	-
11	Mekarjaya	Sindangsari	-
12	Gurudug	-	-

(Sumber : Data diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Observasi)

Berdasar pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah Desa penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) berbeda-beda tiap tahunnya, tahun anggaran 2019 merupakan yang paling sedikit mendapatkan bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini merupakan program yang difokuskan pada peran pendampingan kepada kelompok masyarakat penerima program. Sehingga selama 1 (satu) tahun anggaran tersebut peran tendaga pendamping harus terus dioptimalkan.

Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tidak dilaksanakan dan diberikan kepada seluruh desa, tetapi hanya beberapa desa saja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diberikan tiap 1 (satu) tahun anggaran. Di Kabupaten Purwakarta sendiri pada Tahun anggaran 2019 program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) telah dilaksanakan di 8 (delapan) Desa di kecamatan yang berbeda-beda. Desa yang mendapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diantaranya Desa Taringgullandeu, Karangmukti, Cadas Sari, Bunder, Nagri Kidul, Sukamulya, Cisantri, dan Gandasoli.

Desa-desa yang telah terpilih untuk menerima program tersebut tentunya telah dilakukan melalui kajian dan berbagai pertimbangan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Pertimbangan tersebut diantaranya masih tingginya tingkat pengangguran yang ada di desa tersebut, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat terkait produktivitas kerja.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Maulidiah Amalina Rizqi dalam jurnal yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)*" menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka TKI di luar negeri di Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik Utara adalah sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, faktor ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah pedesaan. Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia masih minim serta faktor ekonomi yang terbelakang sehingga

mereka terpaksa harus bekerja di luar Negeri. Berikut disajikan data warga Desa yang bekerja sebagai TKI di antara ke-8 (delapan) Desa yang menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Warga Desa yang Bekerja Sebagai TKI Tahun 2017**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Taringgullandeh	29	50	<b>79</b>
2	Cilandak	12	39	<b>51</b>
3	Sukamulya	15	30	<b>45</b>
4	Bunder	14	10	<b>24</b>
5	Nagri Kidul	0	10	<b>10</b>
6	Cadasa Sari	2	3	<b>5</b>
7	Karangmukti	0	0	<b>0</b>
8	Gandasoli	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>142</b>	<b>214</b>

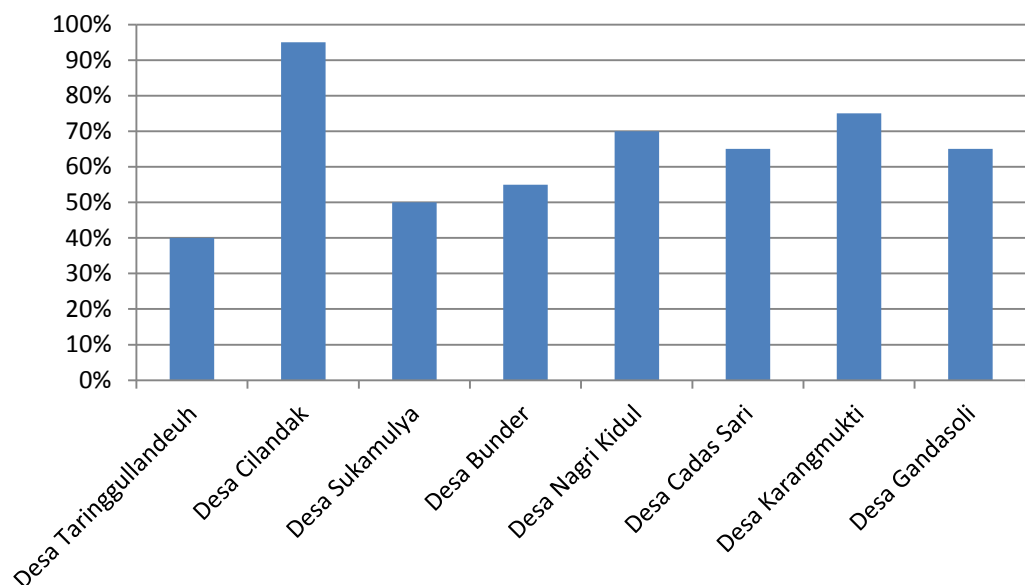
Sumber : (berbagai sumber dalam Kabupaten Purwakarta dalam Angka, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bu Tuti Gantini selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini dilakukan untuk mengurangi tingginya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar Negeri, melihat persoalan masih kompleksnya masalah TKI di luar Negeri. Dengan adanya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini diharapkan masyarakat dapat mampu secara mandiri bekerja di daerahnya sendiri dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga jumlah TKI keluar Negeri dapat diminimalisir.

Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja kepada para pengangguran. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dikatakan efektif apabila setelah pelaksanaan program dapat menyerap tenaga kerja untuk masyarakat

penganggur. Penyerapan tenaga kerja tersebut seharusnya mampu menyerap masyarakat lainnya yang tidak memiliki pekerjaan atau minimal mampu menyerap masyarakat yang menerima bantuan program. Namun pada kenyataannya, hal tersebut belum dapat diimplementasikan. Terbukti masih banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap termasuk pada masyarakat yang menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sendiri. Berikut disajikan data mengenai persentase penyerapan tenaga kerja pada masyarakat yang menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

**Gambar 1.2**  
**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja pada Masyarakat yang Menerima Program TKM di Purwakarta pada Tahun Anggaran 2019**



(Sumber : Data diolah Peneliti dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigasi Kabupaten Purwakarta mengenai Jumlah Serapan program Tenaga Kerja Mandiri tahun Anggaran 2019)

Desa Taringgulandeh merupakan salah satu Desa yang menerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Bentuk bantuan dan pelatihan yang

diberikan kepada Desa Taringgullandeh adalah pelatihan menjahit. Masih tingginya tingkat pengangguran serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Taringgullandeh menjadikan Desa ini dipilih menjadi salah satu desa yang menerima bantuan program TKM dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yang kemudian di Desa Taringgullandeh membentuk kelompok “TKM Sawargi”.

Minimnya lapangan kerja yang tersedia membuat tidak sedikit warga Desa yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri. Desa Taringgullandeh juga merupakan Desa yang paling banyak menyumbang angka TKI ke luar Negeri di antara Desa lainnya yang berada di Kecamatan Kiarapedes. Tingkat pengangguran dan pencari kerja di Desa Taringgullandeh juga cukup tinggi. Berikut disajikan tabel angka ketenagakerjaan di Desa Taringgullandeh.

**Tabel 1.5**  
**Angka Ketenagakerjaan di Desa Taringgullandeh**

Penduduk yang Bekerja	Penduduk yang Tidak dan Sedang Mencari Pekerjaan	Jumlah Angkatan Kerja
660 jiwa	246 jiwa	<b>906 jiwa</b>

Sumber : (Hasil olahan peneliti dalam Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, Prodeskel Bina Pemdes Kemendagri, 2019)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa angka penduduk yang tidak dan sedang mencari pekerjaan cukup tinggi. Presentasinya sebesar 27% penduduk di Desa Taringgullandeh yang belum memiliki pekerjaan. Angka tersebut sangat tinggi bila dibanding dengan presentase di tingkat Kabupaten Purwakarta. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab masih tingginya angka

pengangguran di Desa Taringgullandeh. Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh diharapkan dapat mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga mereka mampu membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi.

Namun setiap pelaksanaan program tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja, pasti terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Begitu pun dengan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), meskipun tujuannya adalah memberdayakan pengangguran tetapi presentase pengangguran di Desa Taringgullandeh masih saja tetap tinggi. Begitupun dengan pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh yang masih menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi pelaksanaan program TKM di Desa Taringgullandeh yang *pertama* adalah masih belum tepatnya sasaran penerima program yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dimana sasaran utama dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah tenaga kerja rentan. *Kedua* adalah sosialisasi belum dilakukan secara meluas dan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan waktu pelatihan sehingga masyarakat tidak mampu menguasai secara maksimal pelatihan menjahit yang diberikan mengingat keterbatasan waktu. Kendala *ketiga* adalah belum berjalannya secara optimal kelompok TKM Desa Taringgullandeh karena masih minimnya produksi yang dilakukan sebab pemasaran yang dilakukan masih kurang optimal. Kendala *keempat* adalah belum terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat selama berlangsungnya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Kendala *kelima* adalah

belum optimalnya tenaga pendamping dalam mendampingi kelompok TKM masyarakat Desa Taringgullandeh.

Setiap program yang dilaksanakan tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja, pasti terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program. Begitu pun dengan pelaksanaan program mengenai program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh yang masih ditemukan banyak kendala dalam setiap fenomena yang ada sehingga pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh belum efektif. Dengan demikian, diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh agar program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama yaitu masih tingginya angka pengangguran di Purwakarta, melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) diharapkan dapat mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Melihat masih kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) khususnya di Desa Taringgullandeh, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta dengan menganalisis pemecahan dari permasalahan tersebut dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI (TKM) DI PURWAKARTA (Studi Kasus : Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a) Secara lebih mendalam dapat menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan hingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
- b) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian, khususnya tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri oleh di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.



### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan *good governance* terutama dalam bidang ketenagakerjaan khususnya tentang efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
- b) Bagi peneliti, dapat memberikan dan masukan serta menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Soko, Kecamatan Glagah,	Efektivitas program oleh Ripley dalam Erwan dan Dyah (2012) : 1. Akses 2. Cakupan 3. Frekuensi 4. Bias 5. Ketepatan layanan 6. Akuntabilitas 7. Kesesuaian program	Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dapat menjalankan secara maksimal dikarenakan : Akses yang didapatkan petani dalam menerima informasi yang diberikan pemerintah tidak	Tidak ada kesamaan dalam fenomena yang digunakan dalam penelitian ini serta di dalam jurnal ini tidak dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program Gemerlap sedangkan pada penelitian ini selain mengukur melalui

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Lamongan (2012-2015) (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga 2017. Vol. 5, No. 2 Noto Mashari Joyo)	dengan kebutuhan	sesuai dan hanya dilakukan dengan tempo waktu yang tidak menentu dan tidak terjadwal membuat penyuluhan kepada masyarakat petani kurang maksimal. Pengelolaan program sepenuhnya diberikan kepada petani, pengelolaan oleh petani tersebut menghadapi beberapa persoalan seperti minimnya unit traktor yang tersedia sehingga tidak semua keinginan masyarakat untuk membajak sawah jadi terpenuhi. Dalam segi pemantauan tidak terjadwal dan tidak pasti kapan adanya, hal ini tentu menyulitkan untuk dilakukannya evaluasi untuk melihat sejauh mana	fenomena efektivitas program tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan program.

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perkembangan program GEMERLAP atau permasalahan yang menghambat kemajuan dari suatu program.	
2	Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar (Jurnal Ekonomi dan Sosial Vol.2 No. 1, Ni Wayan Budiani)	Budiani (2007) mengukur efektivitas program sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat sasaran</li> <li>2. Sosialisasi program</li> <li>3. Tujuan program</li> <li>4. Pemantauan program</li> </ol>	Sebanyak 45 responden atau sebesar 78,95 persen responden menyatakan program penanggulangan pengangguran yang dilaksanakan sudah tepat sasaran. Sebanyak 85,97 persen mendapatkan sosialisasi dari petugas atau pengurus Karang Taruna mengenai pelaksanaan program, tujuan diselenggarakan program serta segala hal lainnya yang menyangkut program penanggulangan pengangguran tersebut. sebesar 70,18 persen	Topik yang dibicarakan sama halnya membahas mengenai penanggulangan penganggura, tetapi program yang dianalisis berbeda. Terdapat beberapa fenomena yang hampir sama antara jurnal dengan penelitian ini, akan tetapi dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program Penanggulangan Pengngguran Karang Taruna.

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			mengetahui tujuan dilaksanakan program penanggulangan pengangguran ini. 50,88 persen dari keseluruhan responden menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran ini terdapat pemantauan yang dilaksanakan oleh penyelenggara program. Hasil perhitungan menyatakan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan cukup efektif.	
3	Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian,	Sutrisno (2007 : 125-126) dalam Rini dan Indah (2015) untuk mengukur Efektivitas Program sebagai berikut : 1. Pemahaman program 2. Ketepatan sasaran	Dilihat dari indikator ketepatan sasaran program dan indikator tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup efektif. Untuk indikator perubahan nyata	Fenomena penelitian yang digunakan antara jurnal dengan penelitian ini berbeda. Selain itu pada penelitian ini belum mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program.

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Sidoarjo) (Jurnal Penelitian Administrasi Publik Untag Surabaya. Rini Puji Lestari dan Indah Murti (2015)	3. Ketepatan waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan nyata	ditunjukkan dengan adanya perubahan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, setelah adanya program diperoleh hasil sangat efektif. Sedangkan jika dilihat dari indikator ketepatan waktu khususnya untuk sektor ekonomi program terkait diperoleh hasil tidak efektif. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat ketika mau meminjam dana itu harus antri dengan kurun waktu yang tidak pasti. Untuk tingkat pendapatan serta ketepatan 200 sasaran program setelah mengikuti program penanggulangan kemiskinan (PNPM Mandiri) yang dilaksanakan di	

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Desa Sedengan Mijen kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo diperoleh hasil positif efektif.	
4	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). (Jurnal Administrasi Publik Unsrat (2014) 2(1) 1-13. Claudio Usman)	Indikator untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo menggunakan variabel : 1. Tepat sasaran 2. Cara kerja yang benar 3. Produktif dalam pelayanan 4. Prestasi kerja 5. Pemanfaatan tenaga, biaya dan peralatan sebagaimana mestinya.	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari program yang masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan 12 masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini. efektivitas program keluarga harapan berpengaruh positif dan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.	Pendekatan penelitian antara di jurnal dan penelitian ini berbeda, fenomena efektivitas program yang digunakan pun berbeda. Dalam jurnal ini pula faktor terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Jurnal ini menyebutkan bahwa melalui program PKH ini dapat mempengaruhi pengurangan terhadap angka kemiskinan, bukan menekankan faktor yang mempengaruhi keefektivan program PKH sendiri.
5	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari	Indikator Efektivitas Program menurut Makmur : 1. Ketepatan	Pelaksanaan program PKH di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota	Terdapat 1 fenomena yang sama dalam penelitian ini. dan di dalam jurnal ini juga sudah

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Jurnal Undip Vol 8, No 2, tahun 2019, Nurul Najidah dan Dra. Hesti Lestari)	Sasaran 2. Ketepatan Tujuan 3. Ketepatan Biaya 4. Ketepatan Berpikir Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program : 1. Koordinasi 2. Perencanaan 3. Ketepatan Layanan	Semarang belum sepenuhnya efektif. Di dalam kriteria ketepatan sasaran, terdapat sasaran yang belum tercakup menjadi keluarga penerima manfaat. Di dalam kriteria ketepatan tujuan, baik keluarga penerima manfaat, pendamping PKH maupun pihak terkait telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan efektif, tetapi nyatanya masih terdapat tujuan belum dapat sepenuhnya efektif. Di dalam kriteria ketepatan biaya, belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan pemanfaatan biaya belum sepenuhnya sesuai aturan dan di dalam kurang	menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program sehingga peneliti mendapatkan referensi banyak terhadap teori faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program menurut para ahli.

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lebihnya jumlah. Di dalam kriteria ketepatan berpikir, telah terlaksana dengan baik meski pihak Dinas Sosial Kota Semarang selaku tenaga kerja belum melakukan kunjungan sesuai aturan yang ditetapkan. Sedangkan faktor pengahmabat keefektifan program diantaranya koordinasi, perencanaan, dan ketepatan layanan.	
6	Effectiveness of Poverty Reduction Program with Value Added Creation in Agribusiness Sector and Formulation of Strategic Plan and Policies (International Journal of Economics and Finance; Vol. 10, No. 4; 2018, Tien Yustini)	Terdapat 5 (lima) variabel untuk mengukur efektivitas Program pengentasan kemiskinan : 1. Tujuan program 2. Ketepatan target 3. Komunikasi 4. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program 5. Kondisi sosial,	Diperlukan model pemberdayaan petani untuk memungkinkan petani miskin berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan. Penguatan ekonomi sosial petani miskin adalah inti dari pemberdayaan petani dan akan optimal jika	Terdapat beberapa fenomena yang sama digunakan dalam pengukuran efektivitas program. Akan tetapi permasalahan, topic, dan di dalam penelitian ini pula tidak dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program.



No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ekonomi dan budaya	petani diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat berdasarkan institusi lokal; Strategi mengembangkan pertanian rakyat dengan budaya industry.	
7	Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009–2010 Drought in Yunnan Province, China (International Journal of Disaster Risk Neera Shrestha Pradhani, dkk)	Terdapat 5 indikator efektivitas implementasi program : 1. Tujuan program 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan program 4. Kinerja aktor yang terlibat 5. Evaluasi	Persepsi petani tentang efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada jangka pendek, hasil langsung, dan nyata dan jarang dalam jangka panjang solusi. Selain dukungan kebijakan pemerintah sebagai langkah cepat untuk mengatasi kekeringan, juga penting untuk mengurangi risiko dengan mengembangkan kesadaran yang	Permasalahan dan topic yang diambil berbeda, fenomena yang digunakan pun tidak lah sama. Dalam jurnal ini lebih menekankan dan menilai bagaimana kinerja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu pula, tidak dijelaskan mengenai faktor yang menghambat mengenai program tersebut.

No	Judul dan Pengarang	Variabel dan Fenomena	Temuan	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lebih baik tentang perubahan iklim / kekeringan dan dampaknya, pemahaman bahaya kekeringan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk adaptasi jangka panjang.	
8	Investigating the Effectiveness E-Government Establishment in Government Organization (Procedia - Social and Behavioral Sciences 230 ( 2016 ) 136 – 141 Reza Khodae Mahmoodi, dkk.)	Mengukur efektivitas pelaksanaan <i>E-Gov</i> dengan menggunakan 5 (lima) model : 1. Model tujuan 2. Model sistem 3. Model strategis konsisten 4. Model bersaing nilai 5. Model ketidakefektifan	Penggunaan <i>E-Gov</i> di organisasi pemerintah memuaskan masyarakat.. Melalui <i>e-gov</i> dapat efisiensi waktu, meningkatkan penyampaian informasi, memperkenalkan layanan baru. Melalui <i>e-gov</i> juga dapat membangun komunikasi antar organisasi secara cepat. Penggunaan <i>e-gov</i> memiliki peran penting dalam mengurangi biaya organisasi pemerintah.	Di dalam jurnal ini mengukur efektivitas program melihat dari bagaimana model yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator atau fenomena efektivitas program menurut beberapa ahli.

(Sumber : Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber)

Jurnal yang berjudul “Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan (2012-2015)” bertujuan untuk menggambarkan hasil penilaian pencapaian kinerja suatu program yang diprakarsai oleh Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan (Gemerlap). Efektivitas pelaksanaan program ini diukur dengan indikator sebagai berikut : (1) Akses yang didapatkan petani dalam menerima informasi yang diberikan pemerintah tidak sesuai dan hanya dilakukan dengan tempo waktu yang tidak menentu dan tidak terjadwal membuat penyuluhan kepada masyarakat petani kurang maksimal. (2) Pengelolaan program sepenuhnya diberikan kepada petani, pengelolaan oleh petani tersebut menghadapi beberapa persoalan seperti minimnya unit traktor yang tersedia sehingga tidak semua keinginan masyarakat untuk membajak sawah jadi terpenuhi. (3) Pemantauan yang dilakukan tidak terjadwal dan tidak pasti kapan adanya, hal ini tentu menyulitkan untuk dilakukannya evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan program GEMERLAP atau permasalahan yang menghambat kemajuan dari suatu program. Perbedaan penelitian ini terletak pada tidak adanya kesamaan dalam fenomena yang digunakan dalam penelitian ini serta di dalam jurnal ini tidak dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program Gemerlap sedangkan pada penelitian ini selain mengukur melalui fenomena efektivitas program tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan program.

Jurnal yang berjudul “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar

Timur Kota Denpasar” bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pencegahan pengangguran yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti di Sumerta Selatan. Indikator yang digunakan adalah : (1) Sebesar 78,95 persen responden menyatakan program penanggulangan pengangguran yang dilaksanakan sudah tepat sasaran. (2) Sebanyak 85,97 persen mendapatkan sosialisasi dari petugas atau pengurus Karang Taruna mengenai pelaksanaan program, tujuan diselenggarakan program serta segala hal lainnya yang menyangkut program penanggulangan pengangguran tersebut. (3) Sebesar 70,18 persen mengetahui tujuan dilaksanakan program penanggulangan pengangguran ini. (4) Sebanyak 50,88 persen dari keseluruhan responden menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan pengangguran ini terdapat pemantauan yang dilaksanakan oleh penyelenggara program. Hasil perhitungan menyatakan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan cukup efektif. Perbedaan penelitian terletak pada topik yang dibicarakan sama halnya membahas mengenai penanggulangan penganggura, tetapi program yang dianalisis berbeda. Terdapat beberapa fenomena yang hampir sama antara jurnal dengan penelitian ini, akan tetapi dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program Penanggulangan Pengngguran Karang Taruna.

Jurnal yang berjudul “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo)” bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2015). Indikator yang digunakan adalah : (1) Ketepatan

sasaran program dan indikator tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan cukup efektif. Untuk indikator perubahan nyata setelah adanya program diperoleh hasil sangat efektif. (2) Ketepatan waktu khususnya untuk sektor ekonomi program terkait diperoleh hasil tidak efektif. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat ketika mau meminjam dana itu harus antri dengan kurun waktu yang tidak pasti. (3) Tingkat pendapatan serta ketepatan sasaran program setelah mengikuti program penanggulangan kemiskinan (PNPM Mandiri) yang dilaksanakan di Desa Sedengan Mijen kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo diperoleh hasil positif efektif. Perbedaan penelitian terdapat pada fenomena penelitian yang digunakan antara jurnal dengan penelitian ini berbeda. Selain itu pada penelitian ini belum mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program.

Jurnal yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)” bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang jelas dapat menyelesaikan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari program yang masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini. Efektivitas program keluarga harapan berpengaruh positif dan signifikan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan penelitian antara di jurnal dan penelitian ini berbeda, fenomena efektivitas program yang digunakan pun

berbeda. Dalam jurnal ini pula faktor terdapat perbedaan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Jurnal ini menyebutkan bahwa melalui program PKH ini dapat mempengaruhi pengurangan terhadap angka kemiskinan, bukan menekankan faktor yang mempengaruhi keefektifan program PKH sendiri.

Jurnal yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Jurnal Undip Vol 8, No 2, tahun 2019, Nurul Najidah dan Dra. Hesti Lestari)” bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kota Semarang belum bisa dikatakan efektif dilihat dari beberapa indikator : (1) Ketepatan sasaran, terdapat sasaran yang belum tercakup menjadi keluarga penerima manfaat. (2) Ketepatan tujuan, baik keluarga penerima manfaat, pendamping PKH maupun pihak terkait telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan efektif, tetapi nyatanya masih terdapat tujuan belum dapat sepenuhnya efektif. (3) Ketepatan Biaya, belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan pemanfaatan biaya belum sepenuhnya sesuai aturan dan di dalam kurang lebihnya jumlah. (4) Ketepatan berpikir, telah terlaksana dengan baik meski pihak Dinas Sosial Kota Semarang selaku tenaga kerja belum melakukan kunjungan sesuai aturan yang ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat keefektifan program diantaranya koordinasi, perencanaan, dan ketepatan layanan. Perbedaan penelitian terletak pada terdapat 1 fenomena yang sama dalam penelitian ini. Di dalam jurnal ini

juga sudah menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program sehingga peneliti mendapatkan referensi banyak terhadap teori faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program menurut para ahli.

Jurnal yang berjudul "*Effectiveness of Poverty Reduction Program with Value Added Creation in Agribusiness Sector and Formulation of Strategic Plan and Policies*" bertujuan untuk merumuskan efektivitas model penciptaan nilai untuk pengembangan agribisnis untuk mengatasi masalah kemiskinan pedesaan dan menganalisis dan merancang model Strategis (kebijakan) yang harus dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan model pemberdayaan petani untuk memungkinkan petani miskin berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan. Penguatan ekonomi sosial petani miskin adalah inti dari pemberdayaan petani dan akan optimal jika petani diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan, mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat berdasarkan institusi lokal, strategi mengembangkan pertanian rakyat dengan budaya industri, pengembangan agroindustri berbasis bahan baku, dan pengembangan teknologi yang tepat dan spesifik lokasi, serta penyediaan modal melalui program kredit mikro untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang secara khusus menargetkan kaum miskin adalah strategi yang dianggap tepat untuk mengatasi kemiskinan. Perbedaan penelitian terletak pada terdapat beberapa fenomena yang sama digunakan dalam pengukuran efektivitas program. Akan

tetapi permasalahan, topic, dan di dalam penelitian ini pula tidak dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi efektivitas program

Jurnal yang berjudul "*Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009 2010 Drought in Yunnan Province, China*" bertujuan untuk menilai efektivitas program pemeliharaan air di Kabupaten Longyong Provinsi Yunnan China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi petani tentang efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada jangka pendek, hasil langsung, dan nyata dan jarang dalam jangka panjang solusi. Selain dukungan kebijakan pemerintah sebagai langkah cepat untuk mengatasi kekeringan, juga penting untuk mengurangi risiko dengan mengembangkan kesadaran yang lebih baik tentang perubahan iklim / kekeringan dan dampaknya, pemahaman bahaya kekeringan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk adaptasi jangka panjang. Perbedaan penelitian terletak pada permasalahan dan topic yang diambil berbeda, fenomena yang digunakan pun tidak lah sama. Dalam jurnal ini lebih menekankan dan menilai bagaimana kinerja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu pula, tidak dijelaskan mengenai faktor yang menghambat mengenai program tersebut.

Jurnal yang berjudul "*Investigating the Effectiveness E-Government Establishment in Government Organization*" bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan *E-Government* di organisasi pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan *E-Gov* di organisasi pemerintah memuaskan masyarakat. Melalui *e-gov* dapat efisiensi waktu, meningkatkan penyampaian



informasi, memperkenalkan layanan baru. Melalui *e-gov* juga dapat membangun komunikasi antar organisasi secara cepat. Penggunaan *e-gov* memiliki peran penting dalam mengurangi biaya organisasi pemerintah. Perbedaan penelitian terletak di dalam jurnal ini mengukur efektivitas program melihat dari bagaimana model yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator atau fenomena efektivitas program menurut beberapa ahli.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dilakukan untuk menghindari kesamaan atau plagiasi yang dilakukan terhadap peneliti lain yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program. Melalui penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, namun peneliti mengangkat beberapa penelitian lain sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Selain itu, hal yang belum dibahas secara rinci pada penelitian terdahulu, melalui penelitian ini akan dibahas mengenai hal-hal yang belum dibahas pada penelitian sebelumnya, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Administrasi publik berasal dari dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Pengertian administrasi menurut Herbert A. Simon adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan pendapat lain menurut Leonard D. White, administrasi merupakan suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dengan melihat berbagai definisi dari para ahli, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan

bahwa administrasi merupakan suatu proses usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, ada tiga unsur penting dalam administrasi, yaitu sekumpulan orang, kerja sama, dan tujuan organisasi.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, atau Negara. Sedangkan pengertian administrasi publik menurut Pffiner dan Prethus mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut :

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah, yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan, dan teknik-teknik tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Pendapat lain George J. Gordon menyatakan bahwa administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta yudikatif.

Henry dalam bukunya Mulyadi yang berjudul *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (2015 : 34) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai berikut :

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

Adapun ciri-ciri Administrasi negara yang dikemukakan oleh Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (2014:21) yang dikutip oleh Harbani Pasolong dalam buku Teori Administrasi Publik sebagai berikut :

- a. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah,
- b. Meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka,
- c. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik,
- d. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat, dan
- e. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari berbagai pengertian administrasi publik menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma adalah corak berpikir seorang atau sekelompok orang. Thomas S. Khun dalam (Syafie, 2010:26) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Di dalam beberapa kurun waktu tertentu cara pandang atau cara berfikir seseorang dapat mengalami perubahan, karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Henry

(dalam Keban) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi publik, seperti diuraikan berikut ini.

### **1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)**

Goodnow dalam tulisannya yang berjudul "*Politics and Administration*" pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek lokus saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam paradigma administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

### **2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)**

Tokoh-tokoh terkenal dari paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating,*

*Reporting, dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, fokus lebih ditekankan daripada lokusnya.

### **3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)**

Morstein-Marx seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau realistis, sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya terhadap ketidak-konsistenan prinsip administrasi, dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku universal. Dalam konteks ini, administrasi Negara bukunya *value free* atau dapat berlaku dimana saja, tapi justru selalu dipengaruhi nilai-nilai tertentu.

Di dalam paradigma ini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di lain pihak. Dalam praktek ternyata anggapan kedua yang berlaku, karena itu John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik. Akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang mengajukan kritikan terhadap administrasi tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang digunakan dalam administrasi publik. Perlu diketahui bahwa pada

masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

#### **4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)**

Di dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan kembali secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh ilmu psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetap juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

#### **5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)**

Pada paradigma ini, administrasi publik telah menemukan jati dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu karena sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

Seiring dengan perkembangan paradigma administrasi Negara, terdapat perbedaan para ahli yang memandang bahwa beberapa tokoh menilai terdapat 5 (lima) paradigma dalam perkembangan ilmu administrasi Negara sedangkan yang lainnya melihat 6 (enam) paradigma. Paradigma keenam dari administrasi

Negara dikemukakan oleh Nicholas Henry (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) bahwa pada tahun 1975 Nicholas Henry memperbarui tulisannya yang sebelumnya hanya terdapat 5 (lima) paradigma menjadi 6 (enam) paradigma. Paradigma terakhir yang sekarang adalah *Governance* (1990-sekarang).

#### **6. Governance (1990-Sekarang)**

Konsep dari paradigma ini bukan sesuatu yang baru melainkan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai dengan 1990. Menurut Tamayao (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikaitkan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga Negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dengan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Lebih lanjutnya, Stoker (dalam Ikeanyibe, dkk, 2017), menyatakan lima proposisi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi prinsip paradigma ini yaitu :

- a. Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan di luar pemerintah;
- b. Batas yang abu-abu dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi;
- c. Ketergantungan kekuasaan diantara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif;
- d. Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri; dan
- e. Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk memerintah atau menggunakan wewenangnya.

Selanjutnya, Gibson (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), mengamati bahwa terdapat banyak bentuk dari paradigma *governance* yang didokumentasikan dalam literatur. Setiap model *governance* mengusulkan penekanan yang berbeda yang kurang atau lebihnya bergantung pada konteks lokal. Beberapa modelnya sebagai berikut :

a. *Governance as Government* (Pemerintahan sebagai Pemerintah)

Dalam konteks ini berkaitan dengan penjelasan keberadaan dari masyarakat, pihak ketiga, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan telah ada mulai dari administrasi publik pada era tradisional. Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap menjadi pemegang inisiatif untuk mengintegrasikan aktor-aktor lainnya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

b. *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Model ini menekankan pada pentingnya peranan dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

c. *Governance as Good Enough Governance* (Pemerintahan sebagai Tata Kelola Pemerintahan yang Cukup Baik)

Merupakan konsep dan model alternatif yang diperkenalkan oleh Merilee Grindle dalam tulisannya mengenai penekanan dalam *good governance*. Tata kelola yang cukup baik berkaitan dengan kontribusi intervensi dalam perkembangan politik dan ekonomi perlu dipertanyakan, diprioritaskan, dan relevan dengan kondisi Negara tersebut. pemerintahan sebagai tata kelola



pemerintahan yang cukup baik tidak membahas mengenai jalan pintas dalam pembangunan, pengembangan kebijakan, implementasi program, pemberian layanan ataupun isu-isu dalam *good governance*. Konsep ini hanya mengadvokasi penggunaan pendekatan inkremental dan kontingensi dan prioritas dalam mengejar tata pemerintahan yang baik mengingat keterbatasan sumber daya uang, waktu, pengetahuan, dan kapasitas manusia dan organisasi.

d. *Collaborative, Partnership, Network Governance* (Kolaborasi, Kemitraan, dan Jaringan Pemerintahan)

Model baru dari pemerintahan ini menekankan pada fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, dan banyak hal lain yang menggaris bawahi pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal daripada proses internal, organisasi uang, waktu, pengetahuan, kapasitas manusia, dan organisasi.

Di dalam paradigma administrasi publik, penelitian ini termasuk ke dalam paradigma ke-lima yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik yang muncul mulai tahun 1970 sampai dengan sekarang. Di dalam paradigma tersebut sudah dijelaskan mengenai fokus dan lokus yang jelas. Dimana lokus dari administrasi Negara adalah organisasi publik sedangkan fokusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manajemen publik dengan ilmu manajemen yang memperkuat ilmu administrasi Negara dan kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut, administrasi publik dapat dilihat dari 2 (dua) konsentrasi yang berbeda yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Bahasan dari manajemen publik diantaranya pengukuran efektivitas program yang menunjukkan bagaimana implementasi program yang dilaksanakan oleh suatu

organisasi publik, karena konsep efektivitas program sendiri merupakan pencapaian sasaran antara hasil yang didapatkan dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu organisasi. Di dalam manajemen publik menekankan nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Berkaitan dengan itu, penelitian ini menyoroti administrasi publik dari aspek manajemen publik melalui pengukuran efektivitas program yang dilaksanakan oleh organisasi publik dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

#### **1.5.4 Manajemen Publik**

Para ahli mendefinisikan manajemen publik berbeda-beda. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Ott, Hyde dan Shafritz (1990) mengartikan bahwa manajemen publik adalah upaya untuk memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama. Menurut Overman (1984) manajemen publik adalah sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen. Sedangkan Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Overman (dalam Keban, 2004 :200) Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik. Di sisi lain Ott, Hyde, dan Shafritzs (1990) berpendapat bahwa secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah/publik.

Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemandirian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.

4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Adapun manajemen publik dalam penelitian ini adalah suatu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas program dalam manajemen publik sebagai ukuran pencapaian mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas program tersebut sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan pemerintah, dimana hal tersebut bagian dari salah satu fungsi manajemen yang terakhir yaitu fungsi *controlling* atau pengawasan.

### 1.5.5 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut Subagyo (dalam Ni Wayan Budiani, 2007) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997).

Gibson (dalam Pasolong, 2014:4) mengatakan bahwa, efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Sedarmayanti (2009 :59) mendefinisikan bahwa konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Subkhi dan Jauhar (2013:247) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus

pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sementara menurut Abdurahmat “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Chester I. Barnard memberi definisi efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas”. Pada dasarnya efektivitas menyangkut pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang terlibat didalam suatu organisasi atau lembaga.

Untuk memahami konsep efektivitas terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan dari segi tujuan dan pendekatan dari segi teori sistem. Pendekatan tujuan (*the goal approach*) untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Gibson, 1994: 27). Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Walaupun pendekatan tujuan itu kelihatan sederhana, tetapi

mengandung juga beberapa persoalan. Beberapa kesulitan yang dikenal secara luas meliputi:

1. Pencapaian tujuan tidak segera dapat diukur pada organisasi yang tidak menghasilkan barang-barang yang berwujud (tangibel outputs).
2. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan tercapainya satu tujuan seringkali menghalangi atau mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain.
3. Adanya beberapa tujuan “resmi” yang harus dicapai dan disepakati oleh semua anggota adalah diragukan. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan dari segi teori sistem. Melalui teori sistem dapat ditentukan efektivitas dari segi yang bermanfaat bagi organisasi baik berupa perusahaan bisnis, rumah sakit, badan pemerintah ataupun lembaga yang lainnya.

Kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan efektivitas yang digunakan adalah pendekatan dari segi tujuan. Karena di dalam penelitian ini mengukur seberapa jauh sasaran program yang didapatkan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **1.5.6 Efektivitas Program**

Setiap organisasi dalam mencapai tujuannya membutuhkan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada hakikatnya, program merupakan penjabaran atau rincian dari tujuan organisasi. Dapat pula didefinisikan bahwa program kerangka dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (dalam Mutiarin Dyah, Zainudin Arif, 2014 : 5) bahwa program merupakan perincian pada suatu rencana.

Pariata Westra dkk (dalam Mutiarin Dyah, Zainudin Arif, 2014 : 4-5) menyebutkan bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk atau mekanisme cara-cara pelaksanaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program memiliki unsur penting yakni implementasi dari kebijakan pembangunan nasional, program membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya, dan terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Kaitannya dengan efektivitas program adalah tingkat perwujudan sasaran yang mewujudkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

Menurut Rini dan Indah (dalam Pradipta, 2017) Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu



cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 dalam Satries, 2011) Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Efektivitas program juga dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Berbicara mengenai efektifitas program berarti membahas kinerja organisasi dalam melaksanakan sebuah program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Campball (dalam Mutiarin Dyah dan Zainudin Arif, 2014 : 97) efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksnakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat

kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Makmur (2011 : 6) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Mahmudi (2015 :86) mengatakan apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas karena outcome (pencapaian) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek akan tetapi setelah pelaksanaan program berakhir, sehingga ukuran efektivitas bisa dinyatakan secara kualitatif dengan bentuk pernyataan saja (judgment).

1. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan sala suatu proses untuk menghasilkan output;
2. Output adalah hasil dari proses;
3. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah seluruh masukan data menjadi suatu infomasi;
4. Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara hasil pelaksanaan program yang dijalankan dengan rumusan tujuan program yang ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi / lembaga.

### **1.5.6.1 Indikator Efektivitas Program**

Makmur (2011 : 6) membagi indikator efektivitas program sebagai berikut :

1. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan pemanfaatan biaya, tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan biaya sampai kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

2. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan melalui tenaga kerja yang menjalankan tugas dengan baik dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang dapat memberikan hasil maksimal.

3. Ketepatan tujuan

Ketepatan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi pada jangka panjang.

4. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana kesesuaian antara penerima program dengan kriteria penerima program yang telah ditentukan sebelumnya oleh instansi terkait. Ketepatan sasaran ditentukan oleh pemilihan kriteria dan mekanisme penyaluran. Menurut Makmur (2011 : 8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu

maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan efektivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan dari suatu program. Ketepatan sasaran program diukur dengan apakah masyarakat yang menerima bantuan telah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memang layak menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program terdapat dua indikator yaitu ditujukan untuk pejabat pemerintahan dan masyarakat. Ketepatan sasaran sangat penting untuk menghindari biaya yang tidak perlu bagi pemerintah maupun menjamin keberhasilan program.

Ketepatan merupakan salah satu indikator utama dari program yang bersifat disalurkan seperti program pengentasan kemiskinan. Indikator ketepatan terhadap sasaran merupakan tolak ukur pertama terhadap penyelesaian persoalan yang ada di lapangan, apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan. Ketepatan sasaran berfungsi untuk melindungi masyarakat yang seharusnya menerima program sehingga akan menimbulkan kebermanfaatan bagi masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut.

Dalam memberikan bantuan sosial agar tepat sasaran diperlukan langkah-langkah yang ditempuh, diantaranya adalah perlunya peran pemerintah daerah dan pimpinan yang terlibat didalamnya untuk selalu siap

dan tanggap serta memperkuat kerjasama antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, hingga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Menurut Fiszbein dan Schedy (2009), terdapat dua jenis kesalahan dalam menganalisa kesalahan targeting, yaitu cakupan yang kurang (*under coverage*), dan kebocoran (*leakage*). *Under coverage* atau *exclusivity* dihitung dengan membagi jumlah kasus kesalahan tipe atau pertama dengan jumlah orang yang seharusnya atau layak mendapatkan manfaat program. *Leakage* atau *includivity* dihitung dengan membagi jumlah kasus kesalahan tipe kedua dengan jumlah orang yang menerima manfaat program. *Exclusivity* dapat mengurangi efektivitas program karena tidak meningkatkan kesejahteraan penerima potensial. Ketepatan-ketepatan sasaran yang tepat dan baik dapat menentukan keberhasilan aktifitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuannya.

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Sosialisasi program

Sosialisasi program pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi baik itu program, kebijakan, ataupun peraturan dari pihak pembuat atau pemilik program, kebijakan, dan peraturan kepada pihak-pihak lain yang menjadi pelaksana ataupun yang menjadi sasaran dari program tersebut. Isi informasi yang disebarluaskan bermacam-macam bergantung pada tujuan program.

Sosialisasi program diukur melalui kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program, proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga seorang fasilitator harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi program yang disampaikan seperti nama program, tujuan program, konsep program, jangka waktu pelaksanaan, sasaran dan target program.

Seorang fasilitator juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik atau harus komunikatif. Artinya harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi yang mungkin baru kepada masyarakat dan semaksimal mungkin masyarakat memahami dan bisa menerima sesuatu yang baru tersebut. Komunikatif tidak harus yang banyak bicara namun lebih kepada bagaimana bisa menyampaikan dengan tepat, bisa dipahami dan diterima. Ada kalanya masyarakat masih belum memahami konsep program yang akan dilakukan atau salah menterjemahkan informasi terkait program sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Tak jarang masyarakat menentang pelaksanaan program karena merasa apa yang disampaikan saat sosialisasi dan saat pelaksanaan berbeda, padahal mereka

telah mengikuti program. Untuk menghindari hal-hal tersebut proses sosialisasi harus dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan harus dilakukan secara kontinyu baik kepada komunitas sebagai sasaran program, kepada instansi pemerintahan untuk mendapatkan dukungan dan kepada *stakeholder* terkait. Media yang digunakan untuk sosialisasi program dapat melalui tatap muka, ceramah, internet, televisi, radio, media cetak, dan lain sebagainya.

Beberapa metode sosialisasi yang bisa dilakukan diantaranya : 1) sosialisasi langsung, yaitu proses sosialisasi dilakukan secara langsung oleh fasilitator kepada masyarakat. Metode ini paling efektif karena fasilitator akan berhadapan langsung dan memberikan penjelasan terperinci terkait program untuk mengurangi kesalahfahaman karena masyarakat mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Metode ini bisa dilakukan dengan *direct selling* atau berkunjung langsung dari rumah ke rumah, pertemuan RT, arisan, atau pertemuan tingkat desa, dan 2) sosialisasi tidak langsung, melalui perantara. Metode ini efisien dari segi waktu, namun kurang menjamin dari segi hasil karena masyarakat tidak mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Contoh metode tersebut adalah meminta bantuan aparat desa, tokoh masyarakat, atau salah satu warga untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat, tanpa didampingi oleh fasilitator.

## 2. Tepat sasaran

Ketepatan sasaran berarti sejauh mana pelanggan dari program tersebut dapat tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

### 3. Tujuan program

Tujuan program menyangkut sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 4. Pemantauan program

Pemantauan program dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian pada pelanggan.

Menurut Campbell (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014 : 96-97) pengukuran efektivitas program yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program, dimana program yang dijalankan memberikan dampak yang positif terhadap perubahan yang ada.
2. Keberhasilan sasaran, yakni sejauh mana tujuan dari program yang dilakukan tepat sasaran.
3. Kepuasan terhadap program, dalam hal ini masyarakat dapat merasakan kepuasan dalam mengakses dan menikmati program yang ada.
4. Tingkat output dan input, yakni sumber pemasukan dan hasil kinerja dari program.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh, dimana tujuan program yang dilaksanakan dapat terwujud dan menyeluruh ke semua lapisan yang ada di masyarakat. Pencapaian tujuan menyeluruh ini mengacu pada perumusan tujuan yang



telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga / organisasi / instansi terkait. Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi. Pencapaian indikator tujuan dihasilkan dari beberapa *impact* (dampak) dan *outcome* (hasil) dari pelaksanaan program.

Salah satu aspek yang bisa digunakan untuk mengukur apakah suatu program telah berjalan dengan efektif atau tidak adalah pemenuhan tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Pencapaian tujuan sebuah kebijakan juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dengan kata lain partisipasi masyarakat yang efektif terhadap suatu program dapat digunakan untuk mengukur keefektifan program itu sendiri.

Proses Pencapaian Tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula pada program tersebut. Pencapaian tujuan mengacu pada rumusan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas program dapat dijalankan

dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Cara organisasi mencapai tujuannya melalui program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas program maupun efektivitas organisasi.

Pencapaian tujuan merupakan indikator utama dalam mengukur suatu efektivitas program, karena jika tujuan program nya saja tidak tercapai maka dapat dikatakan bahwa program tersebut juga belum berjalan dengan efektif. Dalam proses pencapaian tujuan program ada saja kendala yang akan dihadapi, oleh karena itu peran anggota organisasi dan pimpinan sangat dibutuhkan untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi.

Sondang P. Siagian (2008:83-36) berpendapat lain mengenai kriteria atau ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan berfungsi sebagai arahan bagi pegawai untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi diartikan sebagai “pada jalan” atau langkah-langkah dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana dapat mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa tersesat dalam pencapaian tujuan.

3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap

Proses analisis dan penetapan yang mantap berkaitan dengan tujuan dan strategi yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan berfungsi sebagai penjabaran antara tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang pada dasarnya adalah memutuskan mengenai apa yang akan dikerjakan sekarang dan apa yang akan dikerjakan pada masa depan.

5. Penyusunan program yang tepat

Sebuah rencana yang baik perlu dan penting untuk dapat menyusun program dengan tepat. Program merupakan penjabaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan agar pelaksana tidak kurang memiliki pedoman pada saat bekerja ataupun bertindak.

6. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran keefektifan suatu organisasi. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia akan mempengaruhi produktivitas kemampuan bekerja seseorang.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

#### 8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau yang telah berjalan haruslah efektif. Dengan demikian, penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan dalam suatu institusi dalam berjalan dengan lancar dan terkendali.

Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan pengendalian seharusnya lebih menekankan pada usaha-usaha yang bersifat preventif ketimbang yang bersifat represif.
- b. Pengawasan dan pengendalian tidak mencari “siapa yang salah” tetapi hal-hal yang perlu disempurnakan dalam sistem kerja organisasi.
- c. Jika memang terjadi penyimpangan, tindakan korektif yang hendak dilakukan hendaknya bersifat edukatif dan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Obyektifitas dalam melakukan setiap pengawasan dan pengendalian hanya dapat dipertahankan apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas diketahui baik oleh yang diawasi atau yang mengawasi.
- e. Pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dan obyektif tidak berarti bahwa tindakan-tindakan indisipliner tidak diambil tindakan.

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengevaluasi program. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program, pelaksana (evaluator) ingin mengetahui tingkat ketercapaian program, dan apabila tujuan belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan

diambil. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan.

Ukuran dalam sebuah program adalah berhasil dan gagal, sehingga bagaimana suatu program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat dengan memperhatikan variabelvariabel seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dalam efektivitas program dilihat dari produktivitas, kemampuan petugas, pemanfaatan sumber daya, kepuasan yang ditimbulkan oleh pengguna, program yang tepat sasaran, tepat waktu, kesediaan sarana dan prasarana, serta prosedur sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terjadinya perubahan nyata.

#### **1.5.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program**

Efektivitas pelaksanaan program terdapat faktor yang mempengaruhi program dimana hal tersebut mampu menentukan hasil akhir dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (1983) (dalam Mutiarin Dyah dan Zaenudin Arif, 2014 : 98-99) menyebutkan faktor yang mempengaruhi efektivitas dan dampak dari suatu program yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan, yakni menurut Fadil Ali, et al (2011) dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan dari kondisi alam (geografis).
2. Sumber daya merupakan sumber daya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan program.

3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yakni sumber daya yang terlibat dalam proses pelaksanaan program menjadi penentu tercapainya tujuan program. Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program.

Pendapat lain menurut Starman (dalam Kunarjo, 2002:126) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program diperlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Starman menentukan faktor pendukung untuk mengukur efektivitas program, yaitu :

1. Peranan pendamping
2. Partisipasi masyarakat
3. Kemampuan kelompok sasaran

Menurut Suharto (dalam jurnal Najidah 2019) menjelaskan, faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 kriteria, sebagai berikut:

1. Sasaran, bagaimana sasaran penerima program dapat tercapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Koordinasi, bagaimana koordinasi yang terjalin antara para agen pelaksana program.
3. Sosialisasi, bagaimana penyampaian sosialisasi yang dilakukan apakah sudah menyebarluas kepada seluruh masyarakat atau tidak.
4. Jumlah bantuan, seberapa besar jumlah bantuan yang diberikan sehingga mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat penerima program.

Bardach (dalam Jurnal Lestanata, 2016) mengungkapkan bahwa faktor yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan program ada 3, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya
2. Struktur Organisasi yang Kurang Memadai
3. Komitmen yang Rendah dari Pelaksana

### **1.5.7 Angkatan Kerja dan Pengangguran**

#### **1.5.7.1 Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang benar-benar ingin bekerja. Mereka yang ingin bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Konsepsi angkatan kerja perlu dipahami sebagai dasar penyediaan dan penggunaan tenaga kerja. Di Indonesia, konsepsi ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengertian-pengertian dalam konsepsi angkatan kerja ini sebagai berikut :

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.



3. Penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi.
5. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti : sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.
  - a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
  - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
  - c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. Misalnya : dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

6. Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

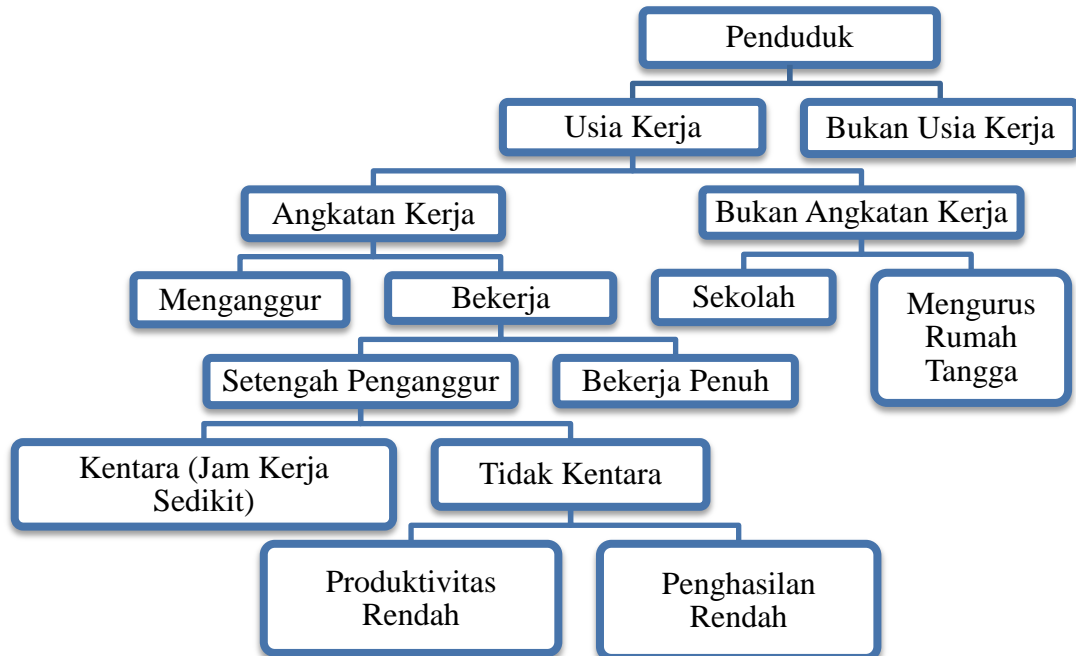
- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pemecahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan-tugaskan, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

7. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pemecahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang berlibur sekolah.

8. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

**Gambar 1.3**  
**Penduduk dan Angkatan Kerja**



(Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI)

### 1.5.7.2 Pengangguran

#### a. Pengertian Pengangguran

Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja (*labor force*). Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk, (a) berusia antara 15 s/d 65 tahun, (b) mempunyai kemauan untuk bekerja, (c) serta sedang mencari pekerjaan. (Kementerian Ketenagakerjaan RI). Meskipun demikian tidak semua orang yang berusia 15 s/d 65 tahun termasuk angkatan kerja, karena mereka tidak mau bekerja. Misalnya orang yang tidak memerlukan lagi pekerjaan karena sudah mempunyai kekayaan yang banyak, ibu-ibu rumah tangga, dan orang yang masih sekolah atau kuliah. Dengan demikian yang disebut angkatan kerja dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Bekerja (*employment*), semua orang yang mempunyai pekerjaan dan bekerja apa saja sehingga dapat memperoleh penghasilan.
2. Tidak bekerja (*unemployment*), orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, tapi sedang berusaha mencari pekerjaan.

Masalah pengangguran menurut Keynes dianggap selalu wujud dalam perekonomian karena permintaan efektif yang wujud dalam masyarakat (pengeluaran agregat) adalah lebih rendah dari kemampuan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa

Defenisi pengangguran masih beragam. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, angkatan kerja berusia 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk 15-64 tahun dan sedang mencari kerja sedangkan yang tidak mencari kerja mungkin saja sedang mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

### **1.5.8 Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)**

Pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tahun anggaran 2019 mengacu pada petunjuk teknis berdasar Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019. Program Tenaga Kerja Mandiri merupakan program penciptaan dan perluasan lapangan kerja melalui pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan/atau setengah penganggur agar menjadi tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru. Menurut Siagian (2008), suatu program dirancang untuk mencapai tujuandari organisasi, program merupakan penjabaran atau tujuan organisasi. Tujuan dari program Tenaga Kerja Mandiri sendiri bermaksud untuk membentuk Tenaga Kerja Mandiri sebagai bagian pelaksanaan program penciptaan dan perluasan lapangan kerja/lapangan usaha bagi tenaga kerja rentan, angkatan kerja muda khususnya penganggur atau setengah penganggur untuk dibina dan dikembangkan menjadi calon wirausaha baru. Efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah tingkat perwujudan sasaran atau tujuan dari pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

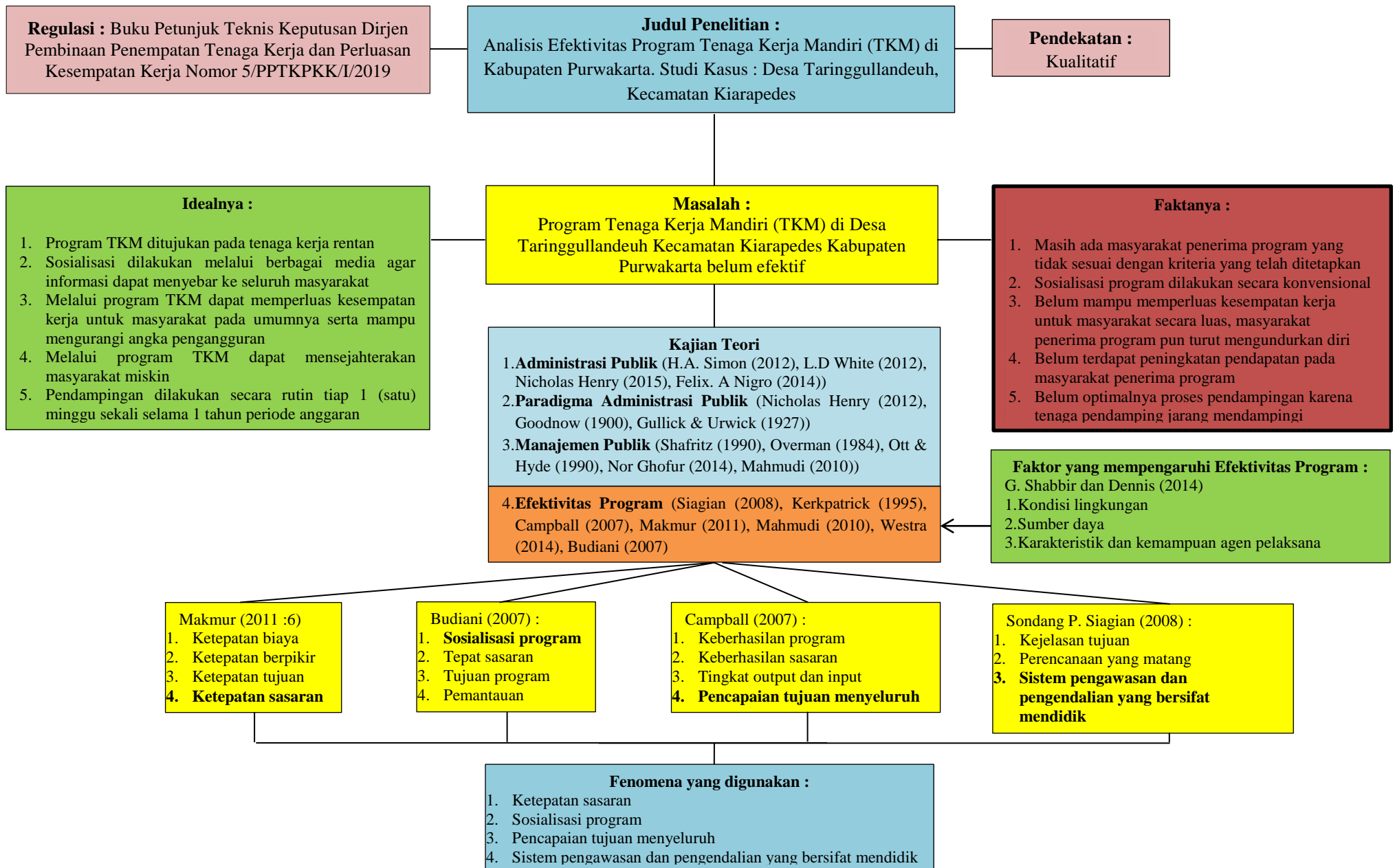
Ruang lingkup kegiatan dari program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) meliputi tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi program, rekrutmen, dan seleksi peserta program TKM. Sosialisasi program merupakan penyebaran informasi baik itu program, kebijakan, atau peraturan dari pembuat program. Proses sosialisasi akan berpengaruh terhadap keberlanjutan

program, oleh karena itu penyampaian sosialisasi harus dilakukan dengan baik agar masyarakat mampu memahami program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Selanjutnya tahap pelaksanaan program yang meliputi pembekalan, pelatihan, dan pemberian bantuan sarana usaha. Tahap terakhir pengendalian yang terdiri dari pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Prinsip dasar kegiatan tenaga kerja mandiri dengan pola pendampingan kewirausahaan sebagai berikut:

1. Penciptaan dan Perluasan Kerja dilakukan melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri dengan pola Pendampingan Kewirausahaan, berbasis komoditas unggulan;
2. Sasaran peserta kegiatan yaitu masyarakat penganggur, setengah penganggur, korban PHK, calon TKI gagal berangkat, TKI purna, TKI bermasalah, tenaga kerja muda, tenaga kerja wanita rentan, tenaga kerja disabilitas, tenaga kerja lansia dan keluarga miskin, orang tua pekerja anak;
3. Pendekatan pelaksanaan kegiatan dengan pola pendampingan, partisipasi dan peningkatan kapasitas;
4. Pelaksanaan kegiatan berazas pada transparansi, akuntabilitas, dan obyektifitas;
5. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pengembangan usaha khususnya dalam rangka pendampingan dan bimbingan lanjutan.

### 1.5.9 Kerangka Berpikir Teoritis



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta merupakan kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan rumusan tujuan program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta. Efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta diukur melalui fenomena yaitu sebagai berikut :

### 1. Ketepatan Sasaran

Untuk mengetahui ketepatan sasaran Program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta peneliti akan melihat dari kriteria sasaran yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 5/PPTKPKK/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun 2019, yang menjadi sasaran adalah kelompok rentan yaitu mereka masyarakat penganggur, setengah penganggur, korban PHK, calon TKI gagal berangkat, TKI purna, TKI bermasalah, tenaga kerja muda, tenaga kerja wanita, tenaga kerja disabilitas, tenaga kerja lansia, dan keluarga miskin.

### 2. Sosialisasi Program

Untuk mengukur efektivitas dalam sosialisasi program dilihat bagaimana sosialisasi mengenai pembinaan dan pelatihan terhadap warga binaan. Dalam upaya sosialisasi harus menggunakan komunikasi yang baik sehingga



masyarakat sasaran dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta atau pun pendamping.

### 3. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pencapaian tujuan yang menyeluruh merupakan tujuan program yang dilaksanakan dapat terwujud dan menyeluruh ke semua lapisan yang ada di masyarakat, terutama bagi para pengangguran yang menerima Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Untuk mengetahui pencapaian tujuan menyeluruh dari Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, peneliti melihat tujuan dari Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sendiri yaitu untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui pembimbingan dan fasilitasi untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja/lapangan usaha yang produktif dan berkelanjutan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

### 4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Sistem Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dalam Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan program. Untuk mengetahui sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik peneliti melihat bentuk pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat

serta solusi apa yang dilakukan jika terdapat kendala dalam melaksanakan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Faktor yang mempengaruhi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan, yaitu lingkungan yang dapat mempengaruhi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta terlaksana seperti kondisi budaya, sosial ekonomi, hukum, serta kondisi geografis.
2. Sumber daya, yaitu sumberdaya yang digunakan dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yakni kemampuan sumber daya khusus yang terlibat dalam proses pelaksanaan program menjadi penentu tercapainya tujuan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang

beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana efektivitas pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa Taringgullandeh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

### 1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan situs penelitian di Desa Taringgullandeh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan kegiatan penelitian serta pengamatan bagaimana efektivitas pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta agar peneliti bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menggunakan teori yang telah ditentukan oleh peneliti.

### 1.7.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif informan dalam penelitian ini ada 8 (delapan), yaitu Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau tenaga pendamping, tenaga pelatih atau *trainer*, perangkat Desa Taringgullandeh ketua kelompok TKM Sawargi, serta 3 (tiga) orang masyarakat yang menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu informan menguasai masalah, memiliki data dan jawaban atas pertanyaan secara akurat (Sugiyono, 2012 : 218-219). Penelitian ini juga memungkinkan untuk menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis, teks gambar, dan bukan angka-angka.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau tenaga pendamping, tenaga pelatih atau *trainer*, perangkat Desa Taringgualndeuh, ketua kelompok TKM Desa Taringgullandeuh, serta 3 (tiga) orang masyarakat yang menerima bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

##### **2. Data Sekunder**

Data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Bentuk data sekunder yang digunakan berupa catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan terhadap gejala dan permasalahan yang diteliti. Bentuk observasi yang dilakukan yaitu mengamati bagaimana efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.

## 2. Wawancara

Menurut Eterberg (dalam Sugiyono, 2016 : 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dionstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Melalui teknik wawancara ini peneliti ingin menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai bagaimana efektivitas program Tenaga Kerja Mandiri di Desa Taringgullandeh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program tersebut. Peneliti memilih informan sesuai dengan ketentuan seperti orang yang jujur dan dapat dipercaya, pejabat berwenang, orang yang mengerti tentang program Tenaga Kerja Mandiri kemudian peneliti membuat panduan wawancara (*interview guide*).

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan, dan sebagainya.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan-catatan, rekaman, dan foto dari informan.

#### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 246), yaitu :

##### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai obyek penelitian dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deskriptif.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016 : 252) adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi obyek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

### **1.7.8 Kulit Data (*Goodness Criteria*)**

Pada penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliabel dengan melakukan uji keabsahan data. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.

Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, penggunaan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data :



1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi atau pun dokumentasi.